

Nama: Reza Tri Anggara

Npm: 2456041040

Kelas: Mandiri B

**PERSEPSI MAHASISWA UNIVERTAS LAMPUNG TERHADAP
KEBIJAKAN KENAIKAN TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT (DPR)**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang bagaimana masyarakat memandang kebijakan lembaga legislatif di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian-penelitian tersebut krusial sebagai dasar karena dapat memberikan wawasan mengenai cara masyarakat merespon kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan isu kesejahteraan pejabat publik.

Subarsono (2021) mengungkapkan bahwa legitimasi politik seharusnya tidak semata-mata bergantung pada kekuatan hukum. Meskipun secara konstitusi DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan internal, termasuk besaran tunjangan, hal ini tidak secara otomatis menjamin diterimanya oleh masyarakat. Legitimasi politik sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerimanya. Contohnya, ketika kebijakan peningkatan tunjangan DPR diumumkan, masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi merespons dengan negatif. Ini menunjukkan bahwa legitimasi yang didasarkan pada hukum dapat hancur jika tidak didukung oleh legitimasi sosial.

Santosa (2022) menyoroti pentingnya transparansi dalam membangun pemerintahan yang baik. Penelitiannya menunjukkan bahwa

ketika pelaksanaan kebijakan keuangan negara dilakukan secara terbuka, masyarakat cenderung lebih menerima. Sebaliknya, jika informasi disajikan secara rumit, publik menjadi curiga. Hal ini sangat relevan terkait dengan kasus DPR. Struktur tunjangan yang “berlapis-lapis” (Nugroho, 2025) menyebabkan kebingungan di kalangan publik. Mahasiswa Universitas Lampung, sebagai individu yang berpendidikan, menjadi semakin kritis terhadap situasi ini karena mereka memiliki akses informasi yang lebih luas, baik melalui media massa maupun dunia akademik.

Wijaya, Pudjiarti, dan Winarni (2018) menegaskan posisi mahasiswa sebagai civil society yang aktif memantau pelaksanaan kebijakan. Mereka berperan sebagai “suara rakyat” ketika kebijakan dianggap tidak sesuai. Sejarah telah mencatat peran mahasiswa dalam momen-momen krusial bangsa (1966 dan 1998). Penelitian ini menjadi relevan karena mahasiswa Unila juga memiliki potensi untuk menyampaikan suara kritis masyarakat terhadap DPR.

Pramono (2025) menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya dirumuskan berdasarkan tiga pilar utama: kepentingan masyarakat, keadilan sosial, dan akuntabilitas. Jika salah satu pilar diabaikan, kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan. Dalam konteks DPR, ketiga pilar tersebut justru dilanggar secara bersamaan: kepentingan rakyat diabaikan, keadilan sosial diingkari, dan akuntabilitas sangat minim.

Tulung (2025) lebih mengarahkan perhatian pada sisi empati sosial. Ia menilai bahwa di tengah tantangan ekonomi yang berat, peningkatan tunjangan DPR mencerminkan kurangnya empati. Ini krusial karena rasa empati publik merupakan elemen dari legitimasi sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa pemimpin mereka tidak menunjukkan empati, maka kesenjangan antara rakyat dengan wakilnya semakin melebar.

Zulfikar (2025) menambahkan perspektif anggaran. Ia berpendapat bahwa peningkatan tunjangan DPR akan membebani APBN. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. Dari sudut pandang mahasiswa, yang sehari-harinya mempelajari

konsep good governance, kondisi ini menciptakan kontradiksi yang nyata antara teori dan kenyataan.

Dari berbagai penelitian sebelumnya, terlihat pola yang jelas: pandangan publik terhadap DPR sangat dipengaruhi oleh faktor transparansi, keadilan sosial, akuntabilitas, empati sosial, dan efisiensi anggaran. Namun, belum terdapat penelitian yang fokus pada pandangan mahasiswa Universitas Lampung mengenai kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang ingin diisi dalam kajian ini

B. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik, menurut Pramono (2025), merupakan lebih dari sekadar keputusan pemerintah; itu adalah alat untuk mencapai sasaran kenegaraan. Setiap kebijakan publik harus difokuskan pada kepentingan masyarakat luas, keadilan sosial, dan tanggung jawab. Terkait dengan peningkatan tunjangan DPR, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan publik. Dari sudut pandang kepentingan umum, kebijakan ini lebih mendahulukan kelompok elit daripada masyarakat pada umumnya. Dari perspektif keadilan sosial, kebijakan ini menciptakan ketidaksetaraan dengan kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Dalam hal akuntabilitas, kebijakan ini sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada alasan yang logis di tengah situasi ekonomi yang sulit.

2. Teori Legitimasi

Subarsono (2021) mengungkapkan bahwa legitimasi menyangkut penerimaan publik terhadap kekuasaan lembaga negara. Legitimasi bisa bersifat hukum, sosial, maupun moral. DPR mungkin memiliki legitimasi secara hukum dalam menetapkan tunjangan, tetapi legitimasi sosial dan moralnya justru menurun. Ketika mahasiswa Universitas Lampung

menganggap kebijakan DPR sebagai tidak adil dan kurang transparan, mereka sebenarnya sedang mengevaluasi legitimasi DPR dari segi sosial dan moral. Jika pandangan negatif ini menyebar, maka DPR akan menghadapi krisis legitimasi yang bisa merugikan demokrasi.

3. Konsep Good Governance

Prinsip good governance menurut Lele dan Kumorotomo (2021) meliputi:

Transparansi: semua kebijakan harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. DPR tidak berhasil dalam hal ini karena rincian tentang tunjangan terlalu kompleks.

Akuntabilitas: suatu kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. DPR gagal dalam hal ini karena alasan untuk menaikkan tunjangan kurang kuat.

Responsivitas: kebijakan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. DPR tidak berhasil karena rakyat justru sedang mengalami krisis ekonomi.

Keadilan sosial: kebijakan harus mencerminkan keadilan. DPR telah gagal karena ketidaksetaraan pendapatan semakin meningkat.

Oleh karena itu, dari sudut pandang good governance, kebijakan DPR pada tahun 2025 bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak berhasil.

4. Teori Persepsi

Menurut Robbins (2015, dikutip dalam Santosa, 2022), persepsi adalah proses di mana seseorang menafsirkan informasi berdasarkan faktor internal (nilai, pengalaman) dan eksternal (lingkungan sosial, media). Mahasiswa Universitas Lampung membangun persepsi mereka mengenai DPR melalui Informasi dari media (Kompas TV, Detik, Times Indonesia) yang melaporkan mengenai tunjangan DPR. Keadaan ekonomi pribadi dan keluarganya. Nilai-nilai keadilan sosial yang dipelajari di kelas. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR cenderung kritis dan negatif.

5. Mahasiswa sebagai Civil Society

Menurut Wijaya dkk. (2018), mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan kekuatan moral. Peran ini terbukti dalam sejarah politik Indonesia. Tahun 1966, mahasiswa terlibat dalam peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tahun 1998, mahasiswa memimpin gerakan reformasi.

Dalam konteks saat ini, mahasiswa Unila meneruskan tradisi itu dengan menyoroti kebijakan DPR. Kritikan mereka bukan hanya bersifat emosional, tetapi didasarkan pada analisis akademis terkait keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

C. Kerangka Berpikir

Variabel/ Aspek	Indikator	Hubungan Kausal	Dampak/ Akibat
Kebijakan Kenaikan tunjangan DPR (X)	Besaran tunjangan (FITRA, 2025) kurang transparansi (Nugroho, 2025), Tidak Adil (Zulkafir, 2025), Minim Akuntabilitas (Tulung, 2025).	Mempengaruhi persepsi mahasiswa Universitas Lampung	Pandangan mahasiswa menjadi negated dan kritis terhadap DPR
Pandangan Mahasiswa Universitas Lampung (Y)	Transparansi, Keadilan, Akuntabilitas, Empati Sosial, Efisiensi Anggaran.	Membentuk evaluasi terhadap DPR	Legitimasi DPR menurun resistensi sosial meningkat, DPR dianggap gagal menerapkan good governance
Implikasi	Penurunan Legitimasi DPR, Melemahnya kepercayaan publik kegagalan prinsip good governance.	Mengancam demokrasi dan peran DPR	Krisis legitimasi DPR

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

1. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan peningkatan tunjangan DPR dan pandangan mahasiswa Universitas Lampung.
2. H2: Aspek transparansi, keadilan sosial, serta akuntabilitas berpengaruh terhadap pandangan mahasiswa terkait kebijakan peningkatan tunjangan DPR.
3. H3: Pandangan mahasiswa mengenai kebijakan peningkatan tunjangan DPR berdampak pada legitimasi DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (2025). Anggaran DPR RI: Antara fungsi konstitusional dan kemewahan personal. Jakarta: FITRA.
- Lele, G., & Kumorotomo, W. (2021). Tinjauan studi manajemen dan kebijakan publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, Y. (2025, September 1). Pakar kebijakan publik menilai dasar remunerasi anggota DPR sudah usang, tunjangan seperti kue lapis. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/614058/pakar-kebijakan-publik>
- Pramono, J. (2025). Pengantar kebijakan publik. Surakarta: Unisri Press.
- Santosa, I. (2022). Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 115–128.
- Subarsono, A. G. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tulung, A. (2025, Agustus 20). Kenaikan tunjangan DPR dinilai tak berpihak ke rakyat, akademisi UGM: Minim empati sosial. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/politik/552030/kenaikan-tunjangan-dpr>
- Wijaya, B., Pudjiarti, E., & Winarni, D. (2018). Tata kelola pemerintahan yang baik. Demak: Pustaka Magister.
- Zulfikar, F. (2025, Agustus 28). Tunjangan DPR naik di tengah ekonomi sulit, dosen UGM: Menambah beban APBN. *Detik Edu*. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8074014/tunjangan-dpr>

